



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

#KEMENSOS  
*Hadir*

# Laporan **KINERJA** 2022

Balai Besar Pendidikan  
dan Pelatihan  
Kesejahteraan Sosial  
(BBPPKS) Padang



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**BBPPKS PADANG**  
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

REGIONAL I  
SUMATERA

Jl. Alai Kapalo Koto No. 27 Pauh Kota Padang Sumatera Barat

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja BBPPKS Padang diukur atas dasar Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja BBPPKS Padang mengacu pada Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis BBPPKS Padang Tahun 2020-2024.



Dr. Hasim, M.Si  
Kepala BBPPKS Padang

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai mana yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pelaksana di lingkungan BBPPKS Padang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Sosial RI secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja BBPPKS Padang serta berguna bagi semua pihak

Padang, Februari 2023  
Kepala BBPPKS Padang

A blue ink signature of the official, consisting of stylized letters and a checkmark-like flourish.

HASIM

## SASARAN KEGIATAN 1

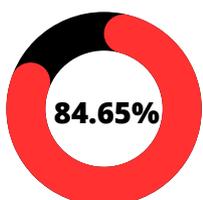
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar

# Ringkasan Eksekutif

Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang terakreditasi

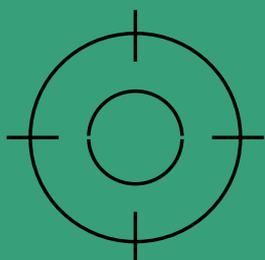


TARGET



REALISASI

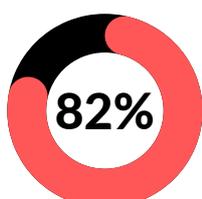
BBPPKS Padang telah menyusun Laporan Kinerja yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja



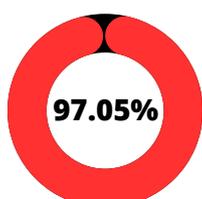
## SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi



TARGET

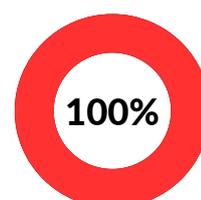


REALISASI

Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat

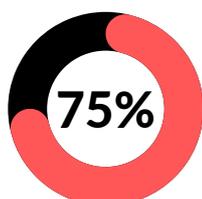


TARGET

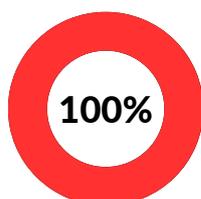


REALISASI

Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup



TARGET



REALISASI

## SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat

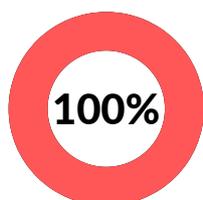


## SASARAN KEGIATAN 4

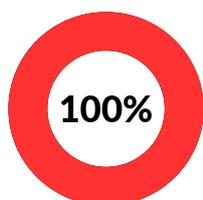
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar

# Ringkasan Eksekutif

Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasarnya Terpenuhi



TARGET



REALISASI



## SASARAN KEGIATAN 5

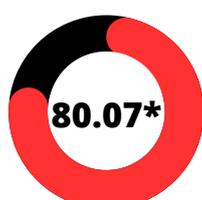
Terwujudnya tatakelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Padang TA 2022



TARGET



REALISASI



TARGET



REALISASI

Nilai Kepuasan Stekholder terhadap Layanan BBPPKS Padang

## SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Kepuasan Stekholder Terhadap Layanan BBPPKS



TARGET



REALISASI



# DAFTAR ISI



	<b>Kata Pengantar</b>	i
	<b>Ringkasan Eksekutif</b>	ii
	<b>Daftar isi</b>	iv
<b>01</b>	<b>Pendahuluan</b>	1
	Latar Belakang	2
	Tugas dan Fungsi	3
	Isu Strategis Organisasi	8
	Sistematika Pelaporan	9
<b>02</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	10
	Rencana Strategis	11
	Sasaran Strategis	12
	Indikator Tujuan	12
	Indikator Kinerja	13
	Rencana Kerja Tahunan	15
	Pohon Kinerja	18
<b>03</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	19
	Analisis Capaian Kinerja	20
	Realisasi Anggaran	30
<b>04</b>	<b>Penutup</b>	34



# 01 Pendahuluan

#KEMENSOS  
*Hadir*



**Pelatihan pemberdayaan masyarakat bidang usaha kuliner kepada penyintas pasca bencana gempa bumi cianjur**

# PENDAHULUAN

Birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik yang disertai dengan rencana tindak (action) yang jelas serta implementasi yang konkrit dan konsekuen. Sehingga pemerintahan yang baik, terpercaya dan berorientasi hasil sebagaimana semangat reformasi birokrasi, mensyaratkan adanya akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan SAKIP yang meliputi: Rencana Strategi, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta ketentuan teknis, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BBPPKS Padang Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020 – 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Sosial RI. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Kementerian Sosial RI.





## TUGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), maka tugas dan fungsi BBPPKS Padang adalah sebagai berikut “Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial (Kesos)”.

## FUNGSI

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat;
3. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
6. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
7. Pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
9. Pelaksanaan pemantaun, evaluasi, dan pelaporan; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha.

## WILAYAH KERJA

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Aceh	18	5	289	6.497
2	Sumatera Utara	25	8	450	6.110
3	Riau	10	2	169	1.859
4	Kepulauan Riau	5	2	70	416
5	Sumatera Barat	12	7	179	1.330
6	Jambi	9	2	141	1.562
7	Bengkulu	9	1	128	1.513
8	Sumatera Selatan	13	4	236	3.239

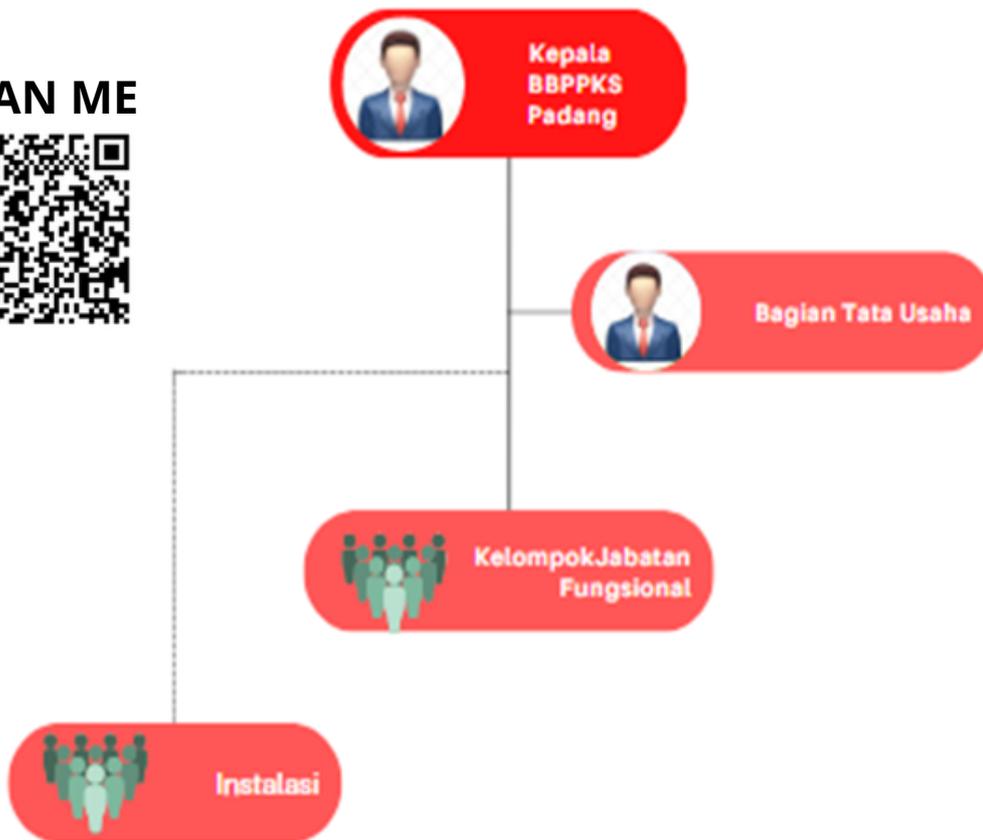
Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia)



# STRUKTUR ORGANISASI

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan  
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang

SCAN ME



Sumber: Peraturan Menteri Sosial No.2 Tahun 2022

PERMENSOS NO 2 TAHUN 2022





## KOMPOSISI PEGAWAI ASN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



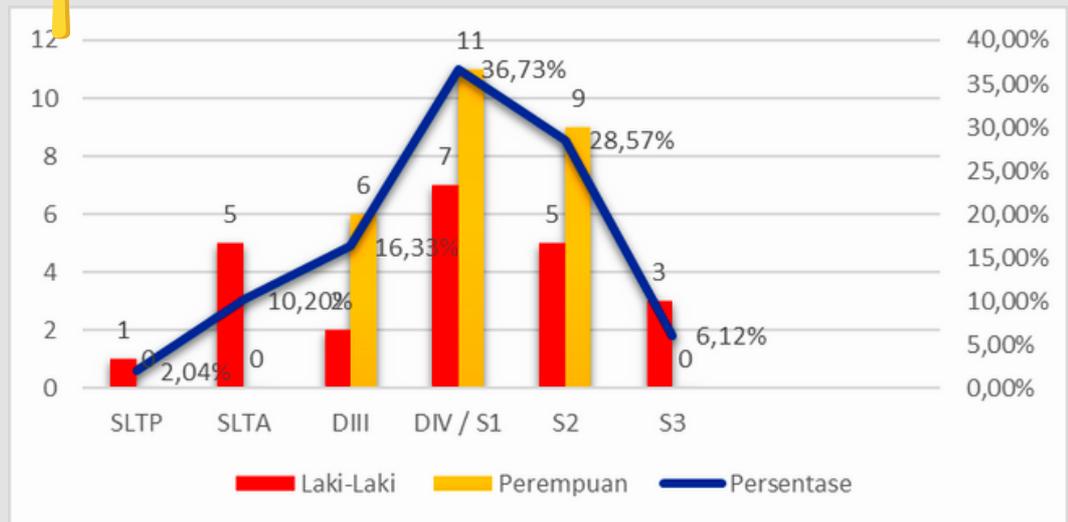
26 Perempuan



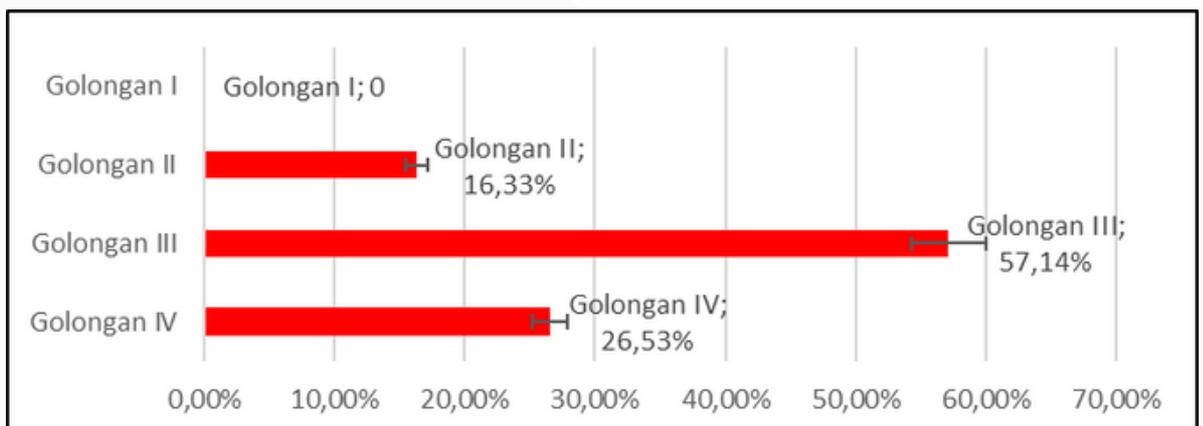
23 Laki-laki



## BERDASARKAN PENDIDIKAN

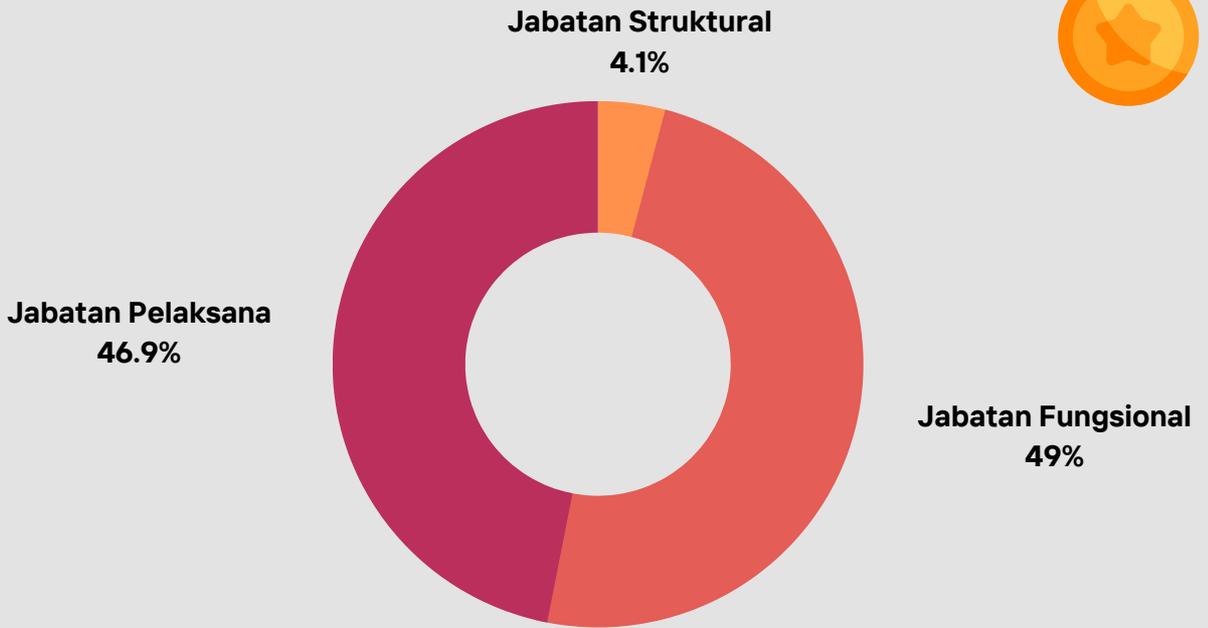


## BERDASARKAN GOLONGAN





## BERDASARKAN JABATAN



## KOMPOSISI PEGAWAI PPNP BERDASARKAN JENIS KELAMIN



9 Perempuan

31 Laki-laki

## KOMPOSISI PEGAWAI PPNP BERDASARKAN JABATAN

Satpam	: 7 orang
Cleaning Service	: 13 orang
Pengemudi	: 6 orang
Administrasi	: 13 orang
Teknisi	: 1 orang
	<b>40 orang</b>

Sumber: Kepegawaian BBPPKS Padang Tahun 2022

# KAMPUS I



Jalan S.Parman No.240 Ulak Karang Kota Padang  
Luas Area 2.833 M<sup>2</sup>



No	Uraian	Jumlah	Kondisi/Kapasitas	
1.	Ruang Kantor	1	Baik	25 Org
2.	Ruang Asrama	30	Cukup Baik	60 Org
3.	Ruang Asrama VIP	7	Cukup Baik	14 Org
4.	Ruang Belajar	2	Cukup Baik	60 Org
5.	Ruang Makan	1	Baik	60 Org
6.	Rumah Dinas Pimpinan	1	Baik	1 keluarga
7.	Garasi	1	Baik	2 Mobil
8.	Gudang Logistik	1	Baik	1 Paket
9.	Mushalla	1	Baik	20 Org
10.	Gedung Pos Jaga	1	Baik	2 Org
11.	Instalasi Diesel/Genset	1	Baik	66 KVA
12.	Sarana air bersih, dengan sistem ground reservoir	1	Baik	1 Paket

Catatan: Digunakan untuk PNBP, SKA dan Kegiatan Respon Kasus

# KAMPUS II

Jalan Alai No. 27 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang  
Luas Area 9.733 M<sup>2</sup>

No	Uraian	Jumlah	Kondisi/Kapasitas	
1.	Gedung Kantor Utama	1	Baik	45 Org
2.	Gedung Asrama (Kamar)	71	Baik	134 Org
3.	Gedung Aula	1	Cukup Baik	150 Org
4.	Ruang Belajar/Kelas	3	Cukup Baik	30/Kelas
5.	Ruang Makan	1	Baik	150 Org
6.	Rumah Dinas	3	Baik	3 Keluarga
7.	Ruang Instalasi Laboratorium Praktikum	1	Baik	35 Org
8.	Profesi Pekerjaan Sosial (ILP3)	1	Baik	3 Org
9.	Ruang Instalasi Perpustakaan	1	Baik	10 Org
10.	Ruang Arsip	1	Baik	5 Org
11.	Ruang BMN	1	Baik	4 Org
12.	Mushalla	1	Baik	30 Org
13.	Ruang Koperasi	1	Cukup Baik	3 Org
14.	Gedung Pos Jaga	1	Baik	2 Org
15.	Instalasi Diesel/Genset	2	Baik	66 KVA
16.	Gedung Serbaguna 2 lantai	1	Baik	30 Org
17.	Mobil Dinas			
	• Fortuner	1	Baik	4 Org
	• Hiace	2	Baik	16 Org
	• Innova	3	Baik	7 Org
	• Senia	1	Baik	6 Org
	• Phanter / Rescue	1	Baik	4 Org
18.	Motor Dinas	3	Baik	2 Org
19.	Posko Data Disaster Center	1	Baik	4 Org



# Isu Strategis Organisasi

## 1



Penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) No 28/ 2019, berimplikasi pada penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, terdapat simplikasi dalam pengalihan jabatan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menpanrb. Penyederhanaan birokrasi pada BBPPKS Padang terwujud dalam penyederhanaan struktur dengan menghilangkan sebagian jabatan eselon III dan eselon IV, dan mempertahankan struktur dengan 1 (satu) eselon II dan 1 (satu) eselon III.

## 2



Pemberdayaan masyarakat bagi Penerima Manfaat/Keluarga Penerima Manfaat (PM/KPM) adalah sebuah siklus pembelajaran di masyarakat berdasarkan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan wewenang, dan kepercayaan kepadasetiap individu masyarakat, serta mendorong untuk kreatif agar dapat berdaya dan mandiri berwirausaha. Memberdayakan individu dan/atau kelompok masyarakat melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan serta sikap hidup) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dukungan pemetaan kebutuhan dan potensi yang diperlukan untuk terkuasnya life skill dari KPM terkait pengelolaan kewirausahaan yang diharapkan menjamin kesinambungan pendapatan PM/KPM setelah digraduasi. Tahun 2022 BBPPKS Padang melakukan kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah 390 orang peserta yang bersal dari PM/KPM.

## 3



Mewujudkan Keputusan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 221/HUK/2022 tentang sentra layanan sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Penambahan fungsi dan peran BBPPKS Padang selain pemberdayaan masyarakat juga melaksanakan Multilayanan dalam bentuk Service Center mencakup kegiatan Tanggap Darurat Bencana, Respon Kasus, Sentra Kreasi Atensi, dan Layanan Dukungan Psikososial;

# Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja BBPPKS Padang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian laporan kinerja BBPPKS Padang Tahun 2022 sebagai berikut:

1

## Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan isu strategis organisasi

2

## Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja

3

## Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Kinerja Pelaksanaan Kegiatan, permasalahan dan pemecahan masalah, serta Analisis Efisiensi

4

## Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas capaian kinerja, dan rekomendasi untuk perbaikan kedepan

# 02 Perencanaan Kinerja

#KEMENSOS  
*Hadir*

## RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Nasional RPJMN 2020-2024 yang salah satu fungsinya merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Berdasarkan Permensos nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024, maka BBPPKS Padang melakukan penyesuaian Rencana Strategis 2020-2024 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Starategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:





# RENCANA STRATEGIS

## VISI & MISI

### A. VISI

Selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yang juga merupakan Visi dan Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

### B. MISI

Misi merupakan pondasi penyusunan perencanaan strategis, pernyataan misi mewujudkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya sebuah organisasi. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024 dilaksanakan melalui 9 misi presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Pembangunan Merata dan Berkeadilan;
3. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
4. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mencapai visi tersebut maka misi ” Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial dan fungsi BBPPKS Padang yang telah di jelaskan sebelumnya pada point pendahuluan.



# SASARAN STRATEGIS

Secara regulasi sasaran strategis BBPPKS Padang mengacu pada Sasaran Strategis Pusdiklatbangprof yang terdiri dari:

1. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan Melibatkan Publik



## INDIKATOR TUJUAN

Sasaran Tujuan BBPPKS Padang guna mencapai tujuan rencana strategis Tahun 2022 terdiri dari:

1. Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang melaksanakan pelayanan Sosial Sesuai Standar;
2. Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos;
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Diklat yang mendukung pencepaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat;
4. Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar;
5. Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi;
6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan BBPPKS.

**Indikator  
Kinerja  
Utama**



# INDIKATOR KINERJA



## 1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi

Kriteria keberhasilannya Persentase (%) LKS yang melakukan pelayanan di bidang sosial sesuai standar sudah terakreditasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah lembaga bidang kesos yang terakreditasi}}{\text{Jumlah lembaga bidang kesos yang dinilai}} \times 100$$

## 2 Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi

Persentase (%) SDM Kesos melakukan pelayanan dan pendampingan sosial sudah memiliki sertifikat pendidikan, kediklatan dan profesi sesuai bidang tugasnya.

$$\frac{\text{Jumlah SDM Kesos yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Profesi sesuai bidang tugasnya}}{\text{jumlah SDM Kesos yang belum memiliki Sertifikat Pendidikan, Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Profesi sesuai bidang tugasnya}} \times 100$$

## 3 Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat

Perhitungan indikator sasaran ini di hitung berdasarkan hasil target/realisasi dari peserta pelatihan yang lulus dengan predikat baik dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pendamping yang mengikuti diklat}}{\text{Target pendamping yang mengikuti diklat}} \times 100$$

## 4 Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi

Kreteria keberhasilannya terpenuhinya hak dasar penerima manfaat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan ATENSI}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100$$

## 5 Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang memiliki kecakapan Hidup

Perhitungan indikator sasaran ini di hitung berdasarkan hasil target/realisasi dari penerima manfaat peserta Diklat yang yang memiliki kecakapan hidup dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang mengikuti diklat dan memiliki kecakapan hidup}}{\text{Jumlah penerima manfaat yang mengikuti diklat}} \times 100$$

## 6 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Pencapaian target indikator Nilai SAKIP BBPPKS Padang dapat diukur melalui Presentase Tingkat capaian organisasi dan Realisasi Keuangan. Tingkat capaian organisasi dapat diperoleh melalui pencapaian target yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja.

## 7 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran meliputi: aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks. Indikator Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada aplikasi span dan aplikasi smart, ada 3 (tiga) aspek pengukuran indikator pelaksanaan anggaran yakni: 1) Kualitas pencanaan anggaran, 2) Kualitas pelaksanaan anggaran, 3) Aspek efektivitas pelaksanaan anggaran

## 8 Nilai Kepuasan Stekholder terhadap Layanan BBPPKS Padang / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian realisasi nilai IKM dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang” masing – masing unsur pelayanan. Setiap unsur pelayanan memiliki nilai rata-rata tertimbang yang sama berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah NRR Pertanyaan}}{\text{Jumlah NRR Tertimbang}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan penilaian IKM yaitu antara 25 s.d. 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\text{Nilai Rata-rata hasil IKM} \times 25 = \text{Nilai Konversi}$$



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targetnya berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). RKT berisikan tentang KRO dan RO prioritas dan target yang akan dilaksanakan selama satu tahun yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja (PK) antara Kepala BBPPKS Padang dengan Kepala Pusat Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Profesi sebagai koordinator, dapat dilihat sebagai berikut:

No	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target
1	2	3	4
1	Pelatihan Bidang Sosial	Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat	390 orang
2	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	SDM Kesos yang melaksanakan pelayanan sosial	30 orang
3	Akreditasi Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti proses akreditasi	200 LKS
4	Sertifikasi Profesi dan SDM	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti proses sertifikasi	3.000 orang
5	Pelatihan Bidang Sosial	Pendamping Sosial PKH yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos	800 orang (1.600 orang SOTK Lama)
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	1 layanan
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1 layanan
		Layanan Umum	1 layanan
		Layanan Perkantoran	1 layanan
8	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen
9	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Manajemen SDM	40 orang

Jumlah Anggaran : Rp.8.179.753.000,-

Sumber: Bidang Program dan Evaluasi BBPPKS Padang 2022



**Dokumen  
RKT**



Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan yang merepresentasikan janji yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BBPPKS Padang dengan Kepala Badiklitpensos disajikan dalam Tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Aparatur Pemerintah (TKSP) dan Masyarakat (TKSM) yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Dengan Predikat Baik	
	a. Jumlah Lulusan Peserta Diklat Kesejahteraan Sosial Bagi Aparatur (TKSP) dengan Predikat Nilai Baik	60 Orang
	b. Jumlah Lulusan Peserta Diklat Kesejahteraan Sosial Bagi Non Aparatur (TKSM) dengan Predikat Nilai Baik	2.400 Orang
2. Terwujudnya Tata Kelola Diklat Kesejahteraan Sosial Yang Baik	Indeks Persepsi Peserta Diklat Terhadap Proses Pelayanan BBPPKS (Menggunakan Skala 1-4)	3,5
3. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Yang Baik	1. Nilai SAKIP BBPPKS Padang TA 2022 <i>(Berdasarkan nilai tahun sebelumnya)</i>	72,05
	2. Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Padang berdasarkan Nilai IKPA Tahun 2022	88,52

Sumber: Bidang Program dan Evaluasi BBPPKS Padang 2022

Sehubungan dengan terbitnya Surat Kementerian Keuangan RI Nomor: S-145/AG/AG.4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Penerbitan Kode Satker Baru Kementerian Sosial RI, maka SOTK lama 369283 dibawah naungan UKE I Badiklitpensos dengan pagu total sebesar Rp.27.531.508.000,- sudah resmi ditutup dan anggaran yang belum terealisasi akan dipindahkan ke SOTK baru 690552 dibawah naungan UKE I Sekretariat Jenderal, dengan rincian Perjanjian Kerja sebagai berikut:

# Revisi PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA

1

**Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar**

Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi **73%**

2

**Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos**

Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi **82%**

Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat **97%**

3

**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup penerima manfaat**

Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup **75%**

4

**Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar**

Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi **100%**

5

**Terwujudnya tatakelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi**

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP **75**

Nilai Kinerja Anggaran **75**

6

**Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS**

Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Padang **90**

Perjanjian Kinerja Revisi

Scan Me



Sumber: Bidang Program dan Evaluasi BBPPKS Padang 2022



# 03 AKUNTABILITAS KINERJA

#KEMENSOS  
*Hadir*



Bidang Usaha Pengolahan Ikan Laut di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

# MENINGKATNYA KUALITAS LEMBAGA DI BIDANG KESOS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR



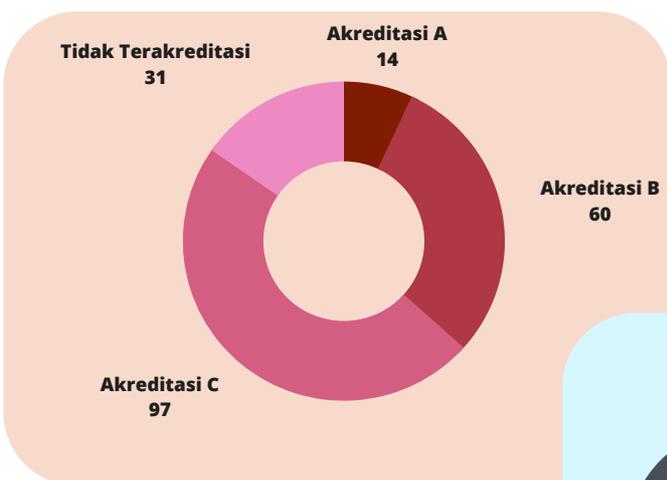
Indikator kinerja			Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	
0	0	0	73 %	84,65%	115,95%	73	73	115,95

## 1.1 AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

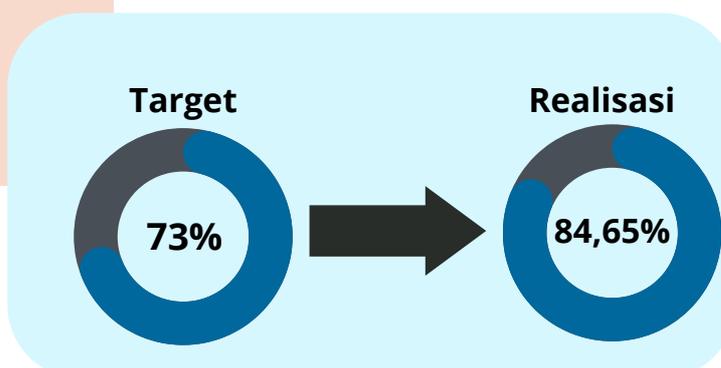
Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.



Analisis Capaian Indikator Kinerja: Persentase (%) LKS yang melakukan pelayanan di bidang sosial sesuai standar sudah terakreditasi Tahun 2022 berdasarkan hasil dengan capaian 202 orang dari 200 orang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:



Dengan realisasi sebesar 85 % maka nilai capaian tahun 2022 sudah melebihi sebesar 12% dari target yang telah di tetapkan sebesar 73%.



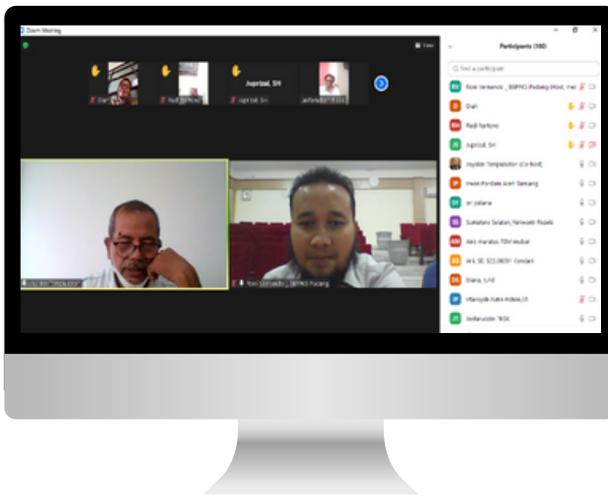


# MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PENYELENGGARA KESOS

## SK 2

Indikator kinerja			Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	
0	0	0	82%	97,05%	118,35%	82%	82%	121,34

## 2.1 SERTIFIKASI SDM KESOS

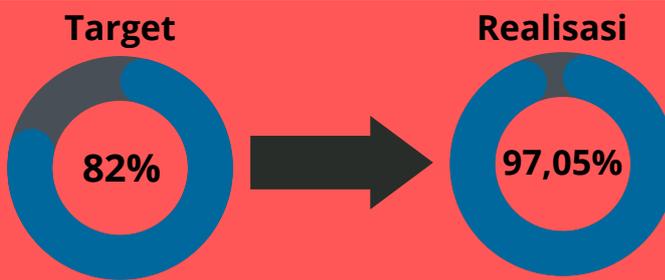


Pada tahun 2022, BBPPKS Padang mendapatkan tugas menyelenggarakan sertifikasi untuk jenis SDM Kesos Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Relawan Sosial (RS). SDM yang akan disertifikasi BBPPKS Padang sebanyak 3000 SDM Kesos.

Analisis Capaian Indikator Kinerja: Persentase (%) SDM Kesos melakukan pelayanan dan pendampingan sosial sudah memiliki sertifikat pendidikan, kediklatan dan profesi sesuai bidang tugasnya berdasarkan hasil dengan capaian 2.987 orang dari 3.000 orang yang telah direncanakan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Hasil Sertifikasi Tahun 2022

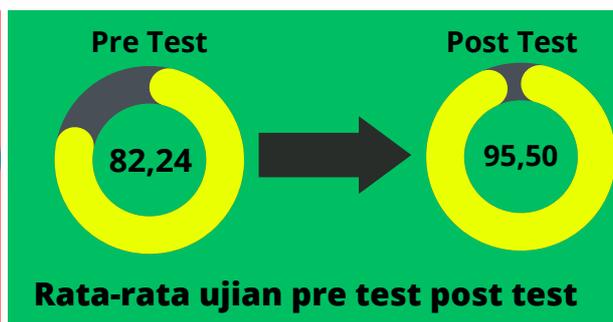
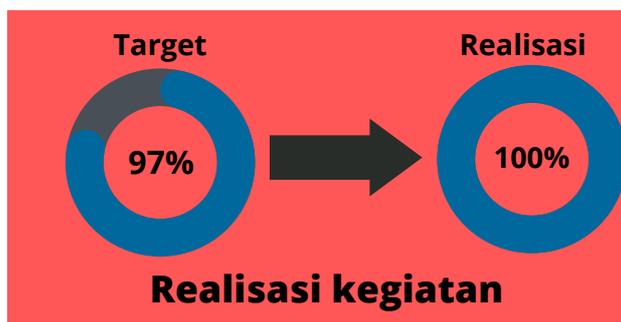


Dengan realisasi sebesar 97,05% maka nilai capaian tahun 2022 sudah melebihi target sebesar 82%, artinya ada kelebihan sebesar 15,05%.



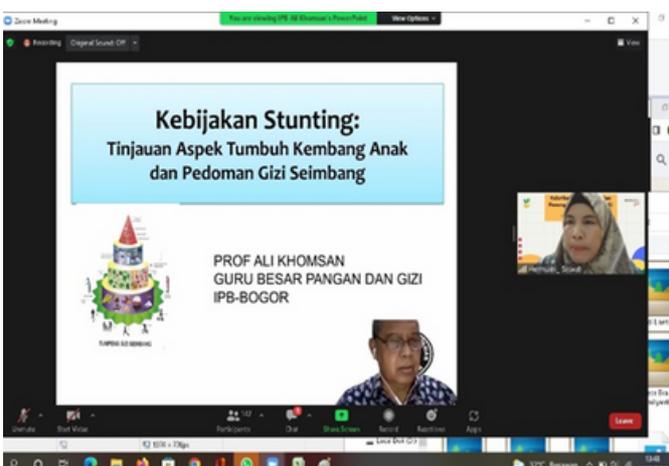


Indikator kinerja			Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	
2000	2000	100%	97%	100%	103,09%	97%	97%	103,09



**2.2 PELATIHAN PENCEGAHAN & PENANGANAN STUNTING (PPPS) BAGI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Kementerian Sosial bekerjasama dengan Tanoto Foundation melalui BBPPKS Padang Tahun 2022 akan melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting sebanyak 2.400 orang peserta yang merupakan Pendamping PKH yang tersebar di 8 wilayah kerja BBPPKS Padang.



Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta dalam hal Pencegahan dan Penanganan Stunting yang diharapkan bisa memberikan dampak positif pada peningkatan kemampuan peserta dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping PKH.



# MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KECAKAPAN HIDUP PENERIMA MANFAAT

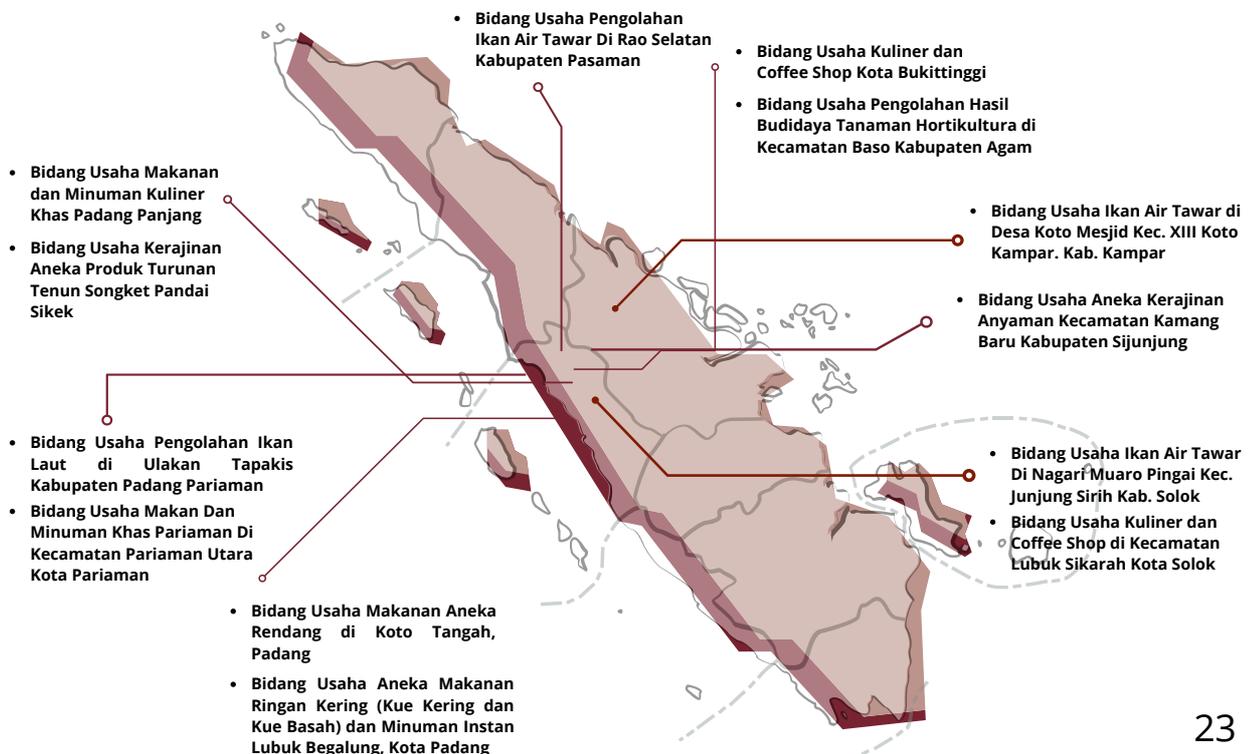
# SK 3

## 3.1 PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) BAGI PM/KPM PKH

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Keterlibatan aktif individu dan/atau kelompok warga sebagai komponen masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan.



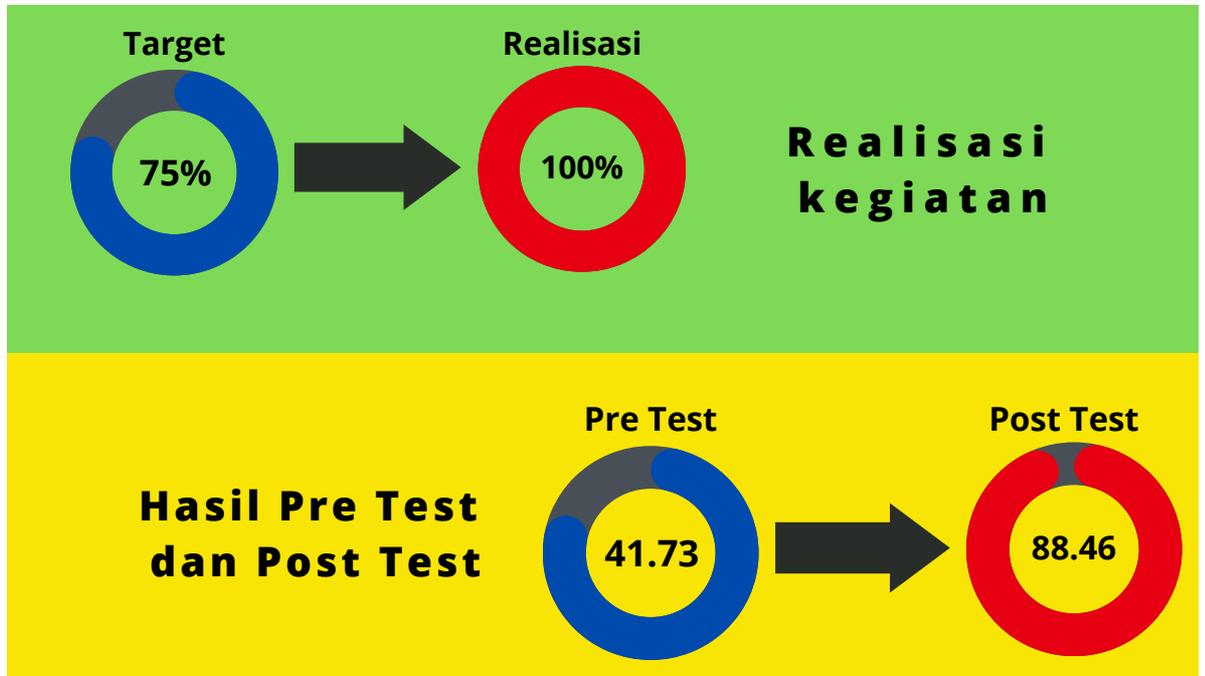
Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini untuk memberdayakan individu dan/atau kelompok masyarakat melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan serta sikap hidup) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupannya secara berkelanjutan. Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebar pada 13 wilayah, yaitu:





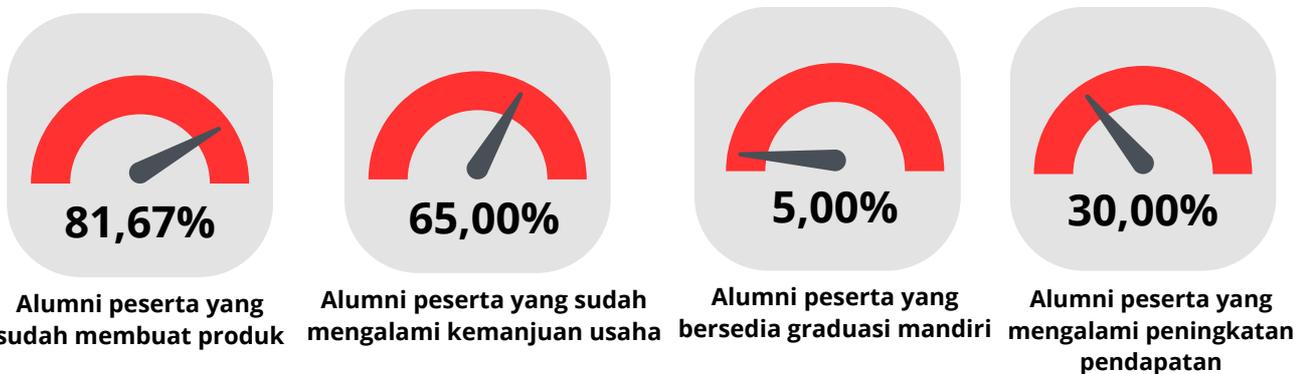
# ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator kinerja			Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	133,33
0	0	0	75 %	100 %	133,33%	75%	75%	



Pada akhir tahun 2022, BBPPKS Padang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelatihan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya melihat kemampuan alumni pelatihan dalam aspek kecakapan hidup atau kemampuan untuk berwirausaha setelah mendapatkan pelatihan.

Aspek kemajuan usaha dinilai dari berbagai faktor seperti kemajuan dalam aspek pemasaran, perizinan, kuantitas serta kualitas dari produk yang dijual.



Hasil Pre test – Post Test dan Monitoring Evaluasi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

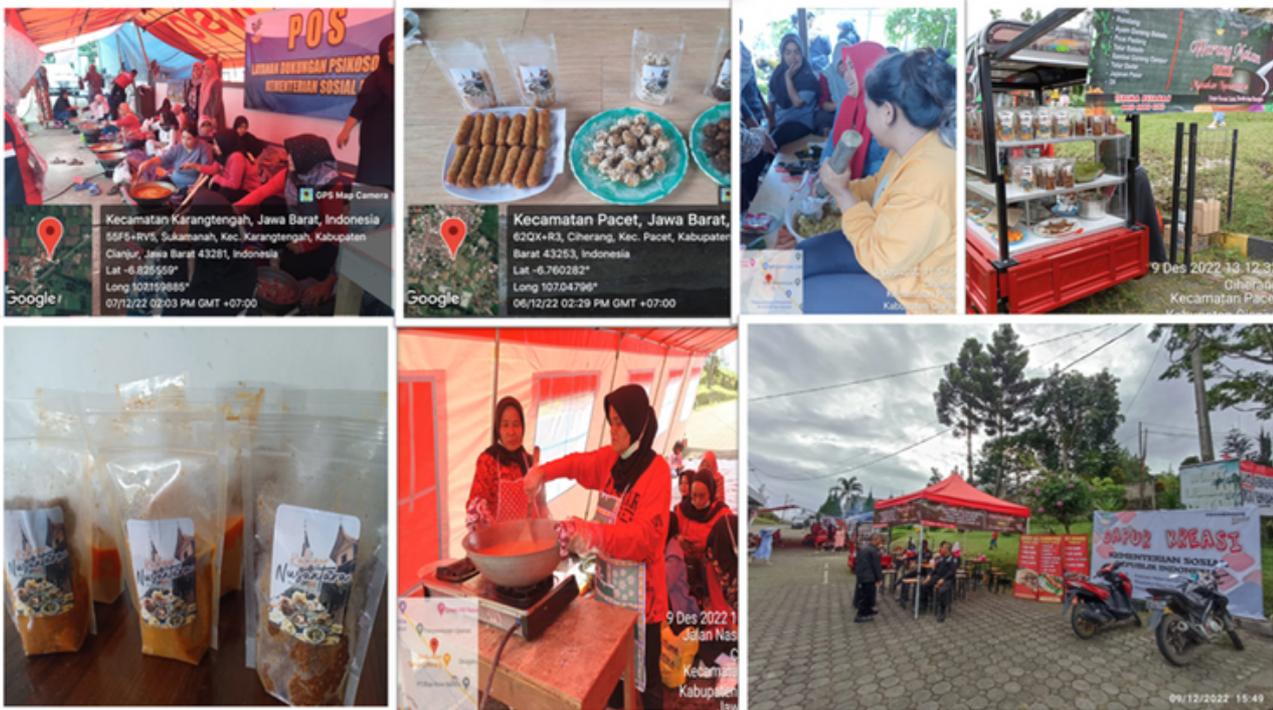


Sukses Story Pemberdayaan Masyarakat



# Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekosistem pada penyintas bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Pemberdayaan masyarakat berbasis ekosistem juga telah diterapkan pada penyintas bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pelatihan masyarakat berbasis ekosistem dengan melibatkan 5 komponen yang terdiri dari: Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna (menguatkan kemampuan (daya), potensi dan sistem sumber agar mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan taraf kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan) serta Sumber Daya Manusia (SDM), Ekosistem dan Kearifan Lokal (Peningkatan Hard Skill dan Soft Skill). Adapun jenis kegiatan pelaksanaan pelatihan melalui Dapur Kreasi yang meliputi:

### Edukasi Kewirausahaan

- Posko RT 3 Kampung Panyewean Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur
- Posko RT 5 RW 4 Kampung Panyawean Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur
- Posko Kampung Baros Wetan Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur
- Posko Kampung Selaawi Desa Sukamanah Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur

### Produk Hasil Usaha

- Olah-an Aneka Masakan Nusantara
- Aneka Kudapan/ Jajanan Pasar
- Minuman (Teh Telur)

### Pengembangan Wirausaha

- Pengembangan wirausaha dilakukan dengan mempromosikan produk pada bazar.

Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan PPM Tahun 2022



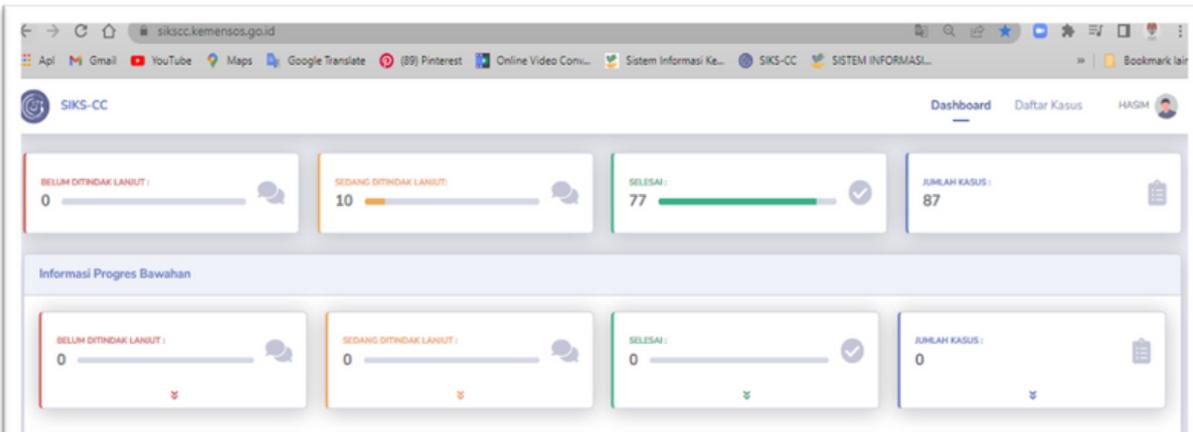
scan me



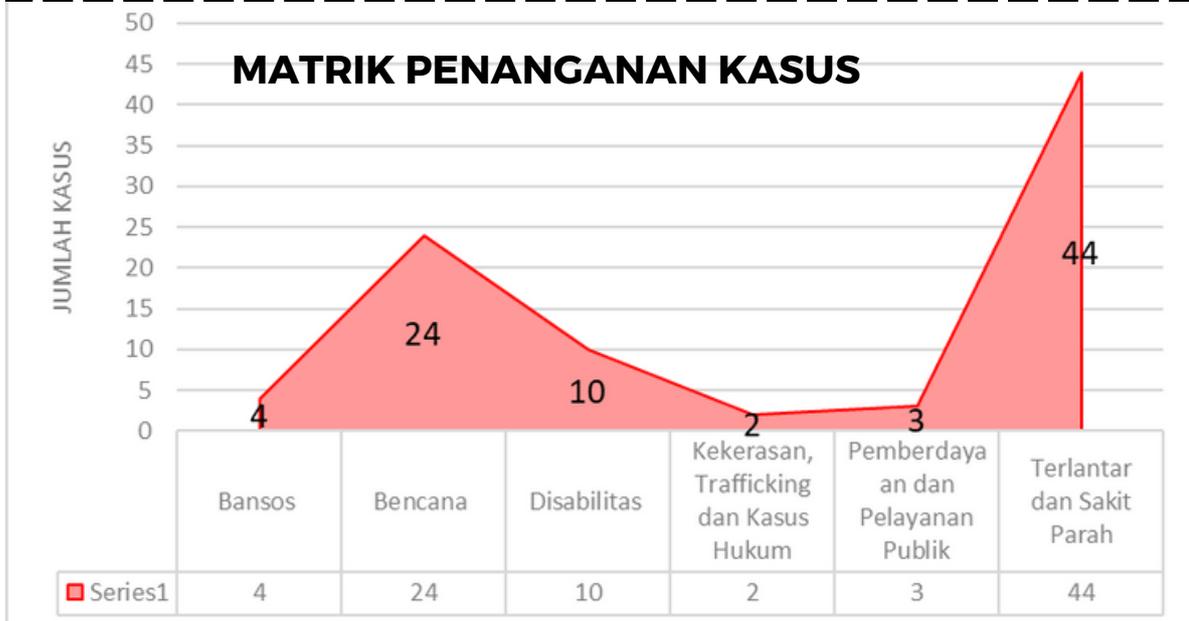
Indikator kinerja			Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	100
0	0	0	100 %	100 %	100%	100%	100%	

**4.1 TERPENUHINYA HAK DASAR PENERIMA MANFAAT**

Berdasarkan Kepmensos Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada BBPPKS, Poltekesos, dan Pusdiklatbangprof menjadi latar belakang menjalankan fungsi Sentra Terpadu Layanan Sosial. Sasarannya adalah Pemerlu Pelayanan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).



Atensi adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial melalui dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, psikososial, mental spiritual, vokasional, kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas





# TERWUJUDNYA TATA KELOLA BBPPKS YANG BAIK DENGAN KUALITAS LAYANAN DAN DUKUNGAN YANG TINGGI

# SK 5

Indikator kinerja			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	
70	72,05	102,93	75	80,07 *	106,76	75	75	106,07

## 5.1 NILAI HASIL EVALUASI SAKIP BBPPKS PADANG

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Nilai SAKIP BBPPKS Padang Tahun 2021 dinilai pada Bulan Maret Tahun 2022 dan Evaluasi Final Agustus Tahun 2022, untuk nilai SAKIP BBPPKS Padang Tahun 2021 memperoleh skor evaluasi sebesar 80,07 dengan kategori (A) dengan interpretasi memimpin perubahan berkinerja tinggi dan sangat akuntabel, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

UNIT/SATUAN KERJA	Nilai 2020	Kategori 2020	Nilai 2021 Maret	Kategori 2021 Maret	Nilai 2021 Agustus	Kategori 2021 Agustus
Poltekesos Bandung	82,93	A	82,03	A	82,03	A
B2P3KS Yogyakarta	80,63	A	66,98	B	70,04	BB
<b>BBPPKS Padang</b>	72,05	BB	80,07	A	80,07	A
BBPPKS Bandung	74,86	BB	80,26	A	80,26	A
BBPPKS Yogyakarta	76,83	BB	81,38	A	81,38	A
BBPPKS Banjarmasin	80,77	A	80,95	A	80,95	A
BBPPKS Makassar	82,40	A	81,99	A	81,99	A
BBPPKS Jayapura	72,30	BB	80,95	A	80,95	A

Sumber: Inspektorat Bidang Penunjang Tahun 2022



# TERWUJUDNYA TATA KELOLA BBPPKS YANG BAIK DENGAN KUALITAS LAYANAN DAN DUKUNGAN YANG TINGGI

# SK 5

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator kinerja			Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Padang TA 2022					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	123,92
88,5	94,1	166,9	75	92,94	123,92	75	75	

## 5.2 NILAI KINERJA ANGGARAN BBPPKS PADANG

Nilai kinerja anggaran BBPPKS Padang adalah hasil kerja yang dicapai dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Nilai kinerja anggaran memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas pengelolaan anggaran meliputi: aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks.

$$(60\% \times \text{Nilai SMART}) + (40\% \times \text{IKPA})$$

$$60\% \times 93,04 + 40\% \times 92,82$$

$$55,82 + 37,12$$

**92,94**



NILAI SMART  
TAHUN 2022



IKPA  
TAHUN 2022

Jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Anggaran Tahun sebelumnya mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, sehingga realisasi mengalami kendala karena tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.



Indikator kinerja			Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Padang					
2021			2022			2023	2024	% Capaian Target 2022
T	R	%	T	R	%	T	T	101,78
3,5	3,5	100	90	91,60	101,78	90	90	

BBPPKS Padang telah melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai tahapan yaitu menyusun instrumen survey, besaran dan teknik sampling serta responden yang sesuai dengan pedoman. Jumlah responden yang masuk sebanyak 1508 orang/(54,05%) dan didapatkan hasil pelaksanaan IKM sebagai berikut:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG KEMENTERIAN SOSIAL RI																										
<table border="1"> <tr> <th>NILAI IKM</th> </tr> <tr> <td style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">91,60</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold;">A (sangat baik)</td> </tr> </table>	NILAI IKM	91,60	A (sangat baik)	<table border="1"> <tr> <td><b>NAMA LAYANAN:</b></td> <td>IKM BBPPKS Padang</td> </tr> <tr> <td><b>RESPONDEN</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>JUMLAH</b></td> <td>: 1508 orang</td> </tr> <tr> <td><b>JENIS KELAMIN</b></td> <td>: 868 LAKI-LAKI 640 PEREMPUAN</td> </tr> <tr> <td><b>PEDIDIKAN</b></td> <td>: SD : 18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SMP : 18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SMA : 261</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DIII : 118</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S1 : 1025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S2 : 68</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Periode Survey: Januari s.d Desember 2022</td> </tr> </table>	<b>NAMA LAYANAN:</b>	IKM BBPPKS Padang	<b>RESPONDEN</b>		<b>JUMLAH</b>	: 1508 orang	<b>JENIS KELAMIN</b>	: 868 LAKI-LAKI 640 PEREMPUAN	<b>PEDIDIKAN</b>	: SD : 18		SMP : 18		SMA : 261		DIII : 118		S1 : 1025		S2 : 68	Periode Survey: Januari s.d Desember 2022	
NILAI IKM																										
91,60																										
A (sangat baik)																										
<b>NAMA LAYANAN:</b>	IKM BBPPKS Padang																									
<b>RESPONDEN</b>																										
<b>JUMLAH</b>	: 1508 orang																									
<b>JENIS KELAMIN</b>	: 868 LAKI-LAKI 640 PEREMPUAN																									
<b>PEDIDIKAN</b>	: SD : 18																									
	SMP : 18																									
	SMA : 261																									
	DIII : 118																									
	S1 : 1025																									
	S2 : 68																									
Periode Survey: Januari s.d Desember 2022																										
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN																										

Pelaksanaan hasil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara pelayanan publik di lingkup BBPPKS Padang umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM rata-rata yaitu 91,60.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan IKM yang sudah dilakukan, sebanyak 1508 responden yang mengisi survey yang disebar di BBPPKS Padang.
3. Rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

# REALISASI ANGGARAN



## Matrik Revisi Anggaran OTK Baru

### 1 Data Awal OTK Baru (DJA) Tanggal 10 September 2022

Anggaran untuk satker baru 690552 yang merupakan perpindahan dari anggaran OTK lama yang belum terealisasi dipergunakan selama periode September-Desember 2022

Perubahan Pagu Rp. 7.550.496.000,-

### 2 Revisi 01 (DJA) Tanggal 19 Oktober 2022

Revisi anggaran untuk penambahan anggaran kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Sosial (Multilayanan dan Respon Kasus), Akreditasi (Visitasi ke LKS) diambil dari optimalisasi Pelatihan Pencegahan Penanganan Stunting dan Sertifikasi SDM dan Peksos

Perubahan Pagu Rp. 7.550.496.000,-

### 3 Revisi 02 (DJA) Tanggal 4 November 2022

Revisi buka blokir sebesar Rp.802.038.000,- dan pelimpahan anggaran dari BBPPKS Yogyakarta sebesar Rp.629.257.000,- untuk penambahan target Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 180 Orang, target awal sebanyak 210 Orang, sehingga total untuk target menjadi 390 Orang

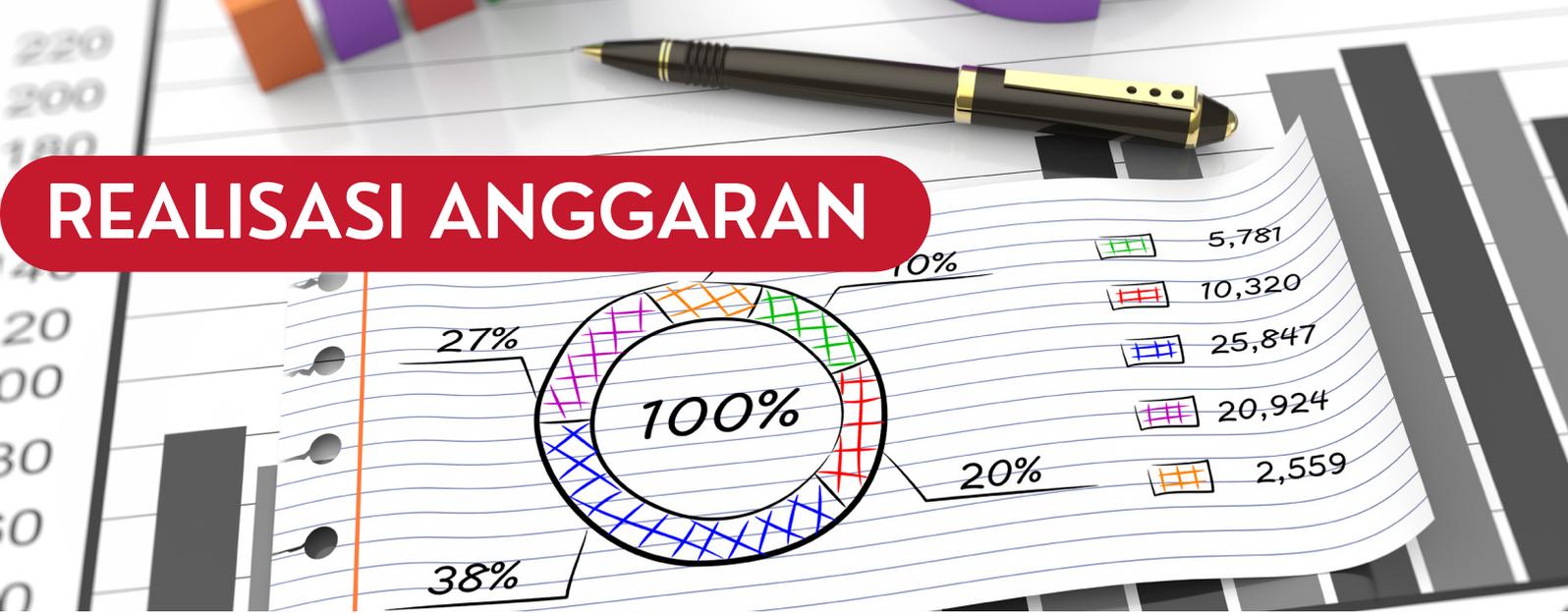
Perubahan Pagu Rp. 8.179.753.000,-

### 4 Revisi 03 (DJPB) Tanggal 30 November 2022

Revisi penambahan anggaran belanja gaji pegawai sebesar Rp.58.596.000,- diambil dari kegiatan Pelayanan Sosial (Multilayanan dan Respon Kasus) dan pemutakhiran data revisi POK.

Perubahan Pagu Rp. 8.179.753.000,-

# REALISASI ANGGARAN



## Matrik Revisi Anggaran OTK Baru

5

**Revisi 04 (DJPB) Tanggal 13 Desember 2022**

Revisi pemutakhiran data revisi POK, penambahan anggaran pada kegiatan akreditasi dan perubahan struktur di akun 524111.

**Perubahan Pagu Rp. 8.179.753.000,-**

6

**Revisi 05 (DJPB) Tanggal 15 Desember 2022**

Revisi pemutakhiran data revisi POK, penambahan anggaran perjalanan dinas pada kegiatan akreditasi.

**Perubahan Pagu Rp. 8.179.753.000,-**

7

**Revisi 06 (DJPB) Tanggal 22 Desember 2022**

Revisi pemutakhiran data revisi POK, penambahan anggaran di kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat pada akun 524111.

**Perubahan Pagu Rp. 8.179.753.000,-**

8

**Revisi 07 (DJPB) Tanggal 27 Desember 2022**

Revisi pemutakhiran data revisi POK, perubahan struktur anggaran pada akun 521211, 521219, 524111 dan 524113.

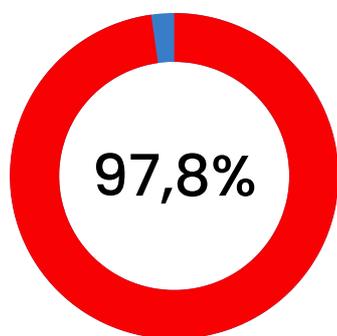
**Perubahan Pagu Rp. 8.179.753.000,-**

Sumber: Data Bidang Program dan Evaluasi Tahun 2022

# REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Sehubungan dengan terbitnya Surat Kementerian Keuangan RI Nomor: S-145/AG/AG.4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Penerbitan Kode Satker Baru Kementerian Sosial RI, maka SOTK lama 369283 dibawah naungan UKE I Badiklitpensos dengan pagu total sebesar **Rp.27.531.508.000,-** sudah resmi ditutup dan anggaran yang belum terealisasi akan dipindahkan ke SOTK baru 690552 dibawah naungan UKE I Sekretariat Jenderal dengan pagu sebesar **Rp. 8,179,753,000,-**

Realisasi OTK Lama  
Pagu Rp. 8.721.102.000,-



Realisasi Rp. 8.713.841.838,-

Realisasi OTK Baru  
Pagu Rp. 8,179,753,000,-



Realisasi Rp. 8.118.932.961,-

Matrik Perbandingan Capaian Pelaksanaan Diklat BBPPKS Padang dari Tahun 2018-2022

Kondisi /Estimasi Tahun Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Target</b>	792 orang	4.636 orang	1.852 orang	2.060 orang	2.790 orang
<b>Capaian Realisasi</b>	792 orang	4.636 orang	1.852 orang	2.090 orang	2.790 orang
<b>Persentase (%) Capaian</b>	100 %	100 %	100 %	101,5 %	100 %

Sumber: Bagian Program BBPPKS Padang Tahun 2022

# REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berikut adalah Matrik Perbandingan Kerangka Keuangan Anggaran dan Realisasi BBPPKS Padang dari tahun 2018-2022:

No	Tahun Anggaran	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2018	Belanja Pegawai	5.333.241.000	5.330.273.234	99.94
		Belanja Barang	15.954.200.000	15.932.581.547	99.86
		Belanja Modal	4.290.600.000	4.286.951.700	99.91
		<b>TOTAL</b>	<b>25.578.041.000</b>	<b>25.549.806.481</b>	<b>99.89</b>
2	2019	Belanja Pegawai	5.780.350.000	5.630.301.624	97.40
		Belanja Barang	48.787.321.000	48.482.166.369	99.37
		Belanja Modal	144.000.000	143.500.000	99.65
		<b>TOTAL</b>	<b>54.711.671.000</b>	<b>54.255.967.993</b>	<b>99.17</b>
3	2020	Belanja Pegawai	5.821.080.000	5.467.163.742	93.92
		Belanja Barang	16.807.366.000	16.184.949.881	96.30
		Belanja Modal	3.520.000.000	3.515.087.732	99.86
		<b>TOTAL</b>	<b>26.148.446.000</b>	<b>25.167.201.355</b>	<b>96.25</b>
4	2021	Belanja Pegawai	6.006.998.000	5.780.720.412	96.23
		Belanja Barang	6.697.773.000	6.635.406.211	99.07
		Belanja Modal	200.000.000	199.920.000	99.96
		<b>TOTAL</b>	<b>12.904.771.000</b>	<b>12.616.046.623</b>	<b>97.76</b>
5	2022	Belanja Pegawai	2.122.774.000	2.106.024.974	99.21
		Belanja Barang	6.056.979.00	6.012.907.987	99.27
		Belanja Modal	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>8.179.753.000</b>	<b>8.118.932.961</b>	<b>99.26</b>

Pada Tahun 2022 terdapat pelatihan prioritas nasional yaitu pelatihan pencegahan dan penanganan stunting sebanyak 2.400 orang realisasi 2.400 orang, sedangkan jumlah peserta diklat aparatur target pelaksanaan Diklat PDPS sesuai kebijakan pemberdayaan masyarakat maka anggarannya dialihkan menjadi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dengan target peserta sebanyak 390 orang dan realisasi sebanyak 390 orang.

# ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, secara umum BBPPKS Padang telah efisien dalam penggunaan anggaran. Rata-rata realisasi kinerja pada sasaran kegiatan "meningkat dibandingkan dengan realisasi anggaran, namun selisih antara realisasi kinerja dan anggaran tidak terlalu signifikan.

Sasaran Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	115,95 %	99,71%
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	110,70%	98,98%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	133,33 %	99,40%
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	100%	99,42%
Terwujudnya tatakelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	115,34%	99,27%
Meningkatnya Kepuasan Stekeholder Terhadap Layanan BBPPKS	101,78 %	-

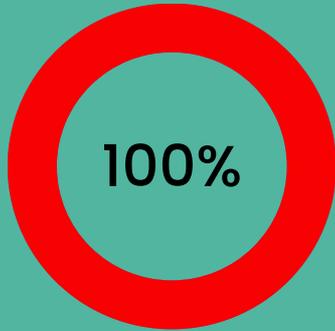
# 04 PENUTUP

#KEMENSOS  
*Hadir*



Dokumentasi Pelaksanaan Respon Kasus dan Kebencanaan yang telah dilaksanakan di BBPPKS Padang

25 Nov 2022 17:08:15  
290° W



BBPPKS Padang menetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Kegiatan dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, semua target indikator berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian lembaga kesos yang terakreditasi sebesar **84,65%** dari target **73%** yang telah ditetapkan, SDM kesos yang tersertifikasi sebesar **97,05 %** dari target **82%** yang telah ditetapkan, SDM kesos pendamping bantuan tunai bersyarat yang mengikuti diklat sebesar **97,05%** dari target **100%** yang telah ditetapkan, Penerima manfaat peserta diklat yang memiliki kecakapan hidup sebesar **100%** dari target **75%** yang telah ditetapkan, Penerima layanan Atensi sebesar **100 %** sesuai target yang telah ditetapkan sebesar **100%**, Nilai hasil evaluasi SAKIP yang masih menggunakan penilaian tahun 2021, karena penilaian SAKIP belum dilakukan, Nilai kinerja anggaran sebesar **92,94** dari target **75** yang telah ditetapkan dan Nilai kepuasan masyarakat sebesar **91,60** dari target **90** yang telah ditetapkan.

Perwujudan realisasi capaian kinerja sasaran tersebut menyerap anggaran Kode Satker 369283 sebesar **Rp. 8.713.841.838,-** atau sebesar **99,92%** dari total anggaran Rp. 8.721.102.000,- sedangkan Kode Satker 690552 penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.118.932.961,- atau sebesar **99,26 %** dari total anggaran **Rp. 8.179.753.000,-**



# SUMMARY

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan dan akan menjadi perbaikan kedepan, yaitu sebagai berikut

- NØ 1** Adanya regulasi dan asistensi yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- NØ 2** Adanya kolaborasi dan satu pemahaman yang jelas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan layanan sosial;
- NØ 3** Perlu adanya sistem informasi yang *user experience* (memberikan kemudahan dan efesiensi bagi pengguna) yang dapat meningkatkan standar pelayanan;
- NØ 4** Perlunya penguatan sistem, mekanisme dan prosedur pelaksanaan peningkatan kapasitas, serta sentra layanan sosial di lingkungan BBPPKS Padang;
- NØ 5** Menyesuaikan kebutuhan program dan anggaran dengan memperhatikan skema dan kebutuhan pelaksanaan sentra layanan sosial;
- NØ 6** Diperlukannya asistensi dalam pelaksanaan sentra layanan sosial di seluruh wilayah kerja BBPPKS Padang;
- NØ 7** Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam pelaksaan Sentra Layanan Sosial kedepan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kepala BBPPKS Padang dalam menyelenggarakan program dan kegiatan Tahun 2022



# Lampiran



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasim  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan  
Kesejahteraan Sosial Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Afrizon Tanjung  
Jabatan : Kepala Pusat, Pendidikan, Pelatihan, dan  
Pengembangan Profesi

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2022

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Pusat, Pendidikan, Pelatihan  
dan Pengembangan Profesi

Afrizon Tanjung

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala Balai Besar Pendidikan dan  
Pelatihan Kesejahteraan Sosial  
(BBPPKS) Padang

Hasim

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(BBPPKS) PADANG**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	a. Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	82%
		b. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	97%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	75%
4.	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%
5.	Terwujudnya tatakelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	a. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75
		b. Nilai Kinerja Anggaran	75
6.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Padang	90

Program/Kegiatan Tahun 2022		Anggaran
<b>Program Perlindungan Sosial</b>		<b>4,628,236,000</b>
1.	Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat	2,791,294,000
2.	Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	1,379,896,000
3.	Penyelenggaraan Diklat Program Keluarga Harapan	457,046,000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>3,551,517,000</b>
1.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	11,553,000
2.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan	3,389,369,000

Jakarta, Oktober 2022

Kepala Pusat, Pendidikan, Pelatihan, dan  
Pengembangan Profesi



**Afrizon Tanjung**

Kepala Balai Besar Pendidikan dan  
Pelatihan Kesejahteraan Sosial  
(BBPPKS) Padang



**Hasim**